

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap orang tergantung dari sudut pandang apa yang digunakan. Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat maupun kekayaan sumber daya alam yang dimiliki negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan harus dilakukan secara bertahap, terencana dan terprogram di segala sektor maupun subsektor. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan adanya pembangunan ekonomi (Widodo, 2006: 4).

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan perekonomian negaranya yang dilakukan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang panjang. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang mendatangkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi hingga saat ini menjadi target utama pembangunan. Dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap. Di dalam pembangunan ekonomi, sektor pertanian masih diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam peningkatan pendapatan nasional terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan bahan pangan (Winoto, 1995 dalam Pratomo. 2010: 16).

Agribisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa unsur kegiatan di antaranya: (1) pra-panen, (2) panen, (3) pasca-panen dan (4) pemasaran. Sebagai sebuah sistem, kegiatan agribisnis tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, mereka saling menyatu dan saling terkait. Terputusnya salah satu bagian akan menyebabkan timpangnya sistem tersebut. Sedangkan kegiatan agribisnis melingkupi sektor pertanian serta beberapa bagian dari sektor industri. Sektor pertanian dan perpaduan antara kedua sektor (pertanian-industri) inilah yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik secara nasional (Sumodininggat, 2000 dalam Nurif, 2010: 124).

Kegiatan agribisnis memiliki peranan yang cukup besar, terutama dalam hal pemantapan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan. Kesemuanya ini merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi yang penting. Sehingga secara umum, kegiatan agribisnis, dalam hal ini sektor pertanian layak dijadikan andalan perekonomian nasional, karena memiliki kontribusi yang dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Nurif, 2010: 124).

Sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang mendominasi pendapatan masyarakat Indonesia, memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi yaitu berupa surplus pangan penduduk yang semakin meningkat dan meningkatkan permintaan akan produk industri (Jhingan, 2012: 362). Peranan pembangunan pertanian sebagai titik pusat pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar memperkuat posisi Indonesia sebagai negara agraris, tetapi juga sebagai batu loncatan menuju tercapainya keseimbangan antara sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan diharapkan mampu memberikan pemecahan permasalahan yang ada karena sektor pertanian memiliki empat fungsi fundamental bagi pembangunan bangsa, yaitu : 1) Mencukupi pangan dalam negeri. 2) Penyediaan lapangan kerja dan berusaha. 3) Penyediaan bahan baku untuk industri. 4) Sebagai penghasil devisa bagi negara (Husodo *et. All* 2009: 26).

Sektor pertanian memang sudah sejak lama memegang peranan penting baik di tingkat nasional maupun regional, namun peranan tersebut cenderung menurun sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang mencerminkan suatu proses transformasi struktural. Transformasi struktural atau perubahan struktur perekonomian adalah perubahan pemusatan kegiatan ekonomi yang awalnya berpusat di sektor primer (pertanian) menjadi sektor sekunder (industri) dan tersier (jasa). Perubahan ini ditandai dengan: (1) merosotnya pangsa sektor primer (pertanian); (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri); dan (3) pangsa sektor tersier (jasa) kurang lebih konstan namun kontribusinya akan meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Kariyasa, 2002: 1).

Secara umum, di negara-negara berkembang seperti Indonesia proses transformasi yang terjadi adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri, atau terjadinya transformasi dari sektor primer kepada sektor non primer (sekunder dan tersier). Struktur perekonomian adalah besar *share* lapangan usaha terhadap total PDRB baik atas dasar harga yang berlaku maupun harga konstan. Dengan mengetahui struktur perekonomian maka dapat diketahui pula konsentrasi lapangan usaha yang dominan pada suatu daerah. Perubahan struktur perekonomian ditandai dengan pergeseran dari tahun ke tahun struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri. Kemakmuran suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pada struktur ekonomi (Saifullah, 2020: 8).

Pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak disertai dengan perubahan struktur tenaga kerja yang berimbang (Swasono, 1993 dalam Kariyasa, 2002: 2). Struktur tenaga kerja di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh sektor pertanian sebanyak 29.76% pada tahun 2020 (BPS, 2021). Pertumbuhan ekonomi tanpa membenahi sektor pertanian terlebih dahulu hanya akan menyebabkan pertumbuhan yang tersendat atau, walaupun pertumbuhan ekonomi bisa di pacu lebih tinggi, kesenjangan akan semakin melebar di antara sektor-sektor ekonomi sehingga menimbulkan dampak negatif lain yang cukup serius. Maka dari itu peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional masih sangat diperlukan mengingat sektor ini sebagai penyedia lapangan kerja terbesar (Ikhsan, dan Armand, 1993: 29).

Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut maka setiap daerah diharapkan mampu menaksir potensi sumber daya yang dimiliki untuk dikembangkan dan dapat menjadi sektor unggul serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi di daerahnya. Ke depannya, pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang sesuai dengan sasaran dan kebutuhan daerahnya.

Dalam teori basis ekonomi disebutkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Kegiatan ekonomi dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Kegiatan basis adalah kegiatan penghasil produk ataupun penyedia jasa yang dapat memenuhi permintaan di dalam daerah serta dapat mengekspor produk dan jasa ke luar daerah. Lapangan kerja dan pendapatan di sektor basis adalah fungsi permintaan yang bersifat *exogenous* (tidak tergantung pada kekuatan intern/permintaan lokal). Sedangkan kegiatan nonbasis adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi konsumsi lokal, oleh karena itu permintaan di sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat. Maka dari itu analisis basis sangat berguna untuk mengkaji dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi wilayah di sektor atau subsektor basis (Tarigan, 2004: 27).

Aktivitas sektor basis yang meningkat akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, yang selanjutnya akan menambah permintaan terhadap barang atau jasa di dalam wilayah tersebut. Penambahan permintaan barang dan jasa pada sektor basis akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan di sektor nonbasis. Dan sebaliknya, berkurangnya aktivitas basis akan berakibat pada penurunan pendapatan yang didapat suatu wilayah, sehingga akan menyebabkan turunnya permintaan produk dari aktivitas nonbasis (Adisasmita, R. 2005: 28).

Pertumbuhan dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Meningkatnya nilai PDRB disebabkan oleh peningkatan output sektor-sektor perekonomian, salah satunya yaitu sektor pertanian. Dengan demikian pembangunan pertanian juga akan menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas pertanian akan diikuti dengan peningkatan pendapatan pekerja di sektor pertanian dan pada gilirannya akan memperluas lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat. (Sunarti, 2016:2). Laju pertumbuhan PDRB yang positif menandakan pembangunan ekonomi daerah di sektor tersebut adalah menguntungkan. Menguntungkan di sini berarti memberikan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antar sektor-sektor perekonomian sangat penting dalam membentuk struktur ekonomi yang kuat. Sinergi antara sektor pertanian, industri dan jasa yang kuat akan membentuk perekonomian yang efisien, dan hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Sjafrizal, 2008 dalam Widianingsih, 2015: 207).

Di Sumatera Barat, sektor pertanian merupakan penyumbang utama dalam struktur perekonomiannya. Kondisi ini dapat dilihat dari besar sumbangan yang diberikan oleh sektor pertanian dalam susunan PDRB Sumatera Barat, yaitu sebesar 22,38% di tahun 2020, angka ini meningkat dibanding tahun 2019 yang kontribusinya 22,15% (BPS Sumatera Barat, 2021). Kondisi ini didukung oleh luasnya penggunaan lahan untuk pertanian menunjukkan bahwa sebagian besar perekonomian masyarakat Sumatera Barat ditopang oleh usaha pertanian. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 36.22% dari jumlah angkatan kerja yang bekerja (Lampiran 1) dan banyaknya jenis komoditi yang dihasilkan di tiap-tiap subsektor pertanian di Sumatera Barat.

Melihat masih tingginya angka tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian mengindikasikan bahwa sektor ini masih menjadi prioritas utama dalam perekonomian daerah Sumatera Barat. Untuk itu kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan memfokuskan pembangunan di subsektor-subsektor basis yang ada di sektor pertanian tersebut. Karena dengan memusatkan pembangunan di subsektor basis akan meningkatkan

pendapatan daerah dan juga akan memacu kegiatan ekonomi di sektor dan subsektor nonbasis lainnya. Dengan begitu diharapkan ke depannya sektor pertanian tidak menjadi beban dalam perekonomian daerah.

B. Rumusan Masalah

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 3.355,30 Km² yang terdiri dari 13 kecamatan, 79 nagari dan 410 Jorong. Dengan didukung oleh iklim dan cuaca serta keadaan tanah yang subur, sektor pertanian menjadi tumpuan dalam memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Selain itu, lokasinya yang cukup strategis karena terletak pada jalur yang menghubungkan dua provinsi yaitu Provinsi Riau dan Sumatera Barat (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021).

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah dalam proses pembangunan ekonominya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota, struktur ekonomi menurut lapangan usaha tahun 2020 didominasi oleh lapangan usaha Pertanian (33,18 persen), kemudian diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (14,84 persen), dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (9,92 persen) (Lampiran 2).

Perkembangan pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari besar kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB atas dasar harga konstan (adhk) yang terus menurun. Pada tahun 2020 besar kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB adhk hanya mencapai 5153,82 miliar rupiah atau sebesar 33,18 persen. Jika dibandingkan tahun sebelumnya kontribusi sektor ini mengalami penurunan di mana tercatat dari tahun 2016 sampai 2019 masing-masing sebesar 36,40 persen di tahun 2016; 35,74 persen di tahun 2017; 34,73 persen di tahun 2018; dan 33,44 persen di tahun 2019. Pada tahun 2020 sektor pertanian memiliki pertumbuhan sebesar 0,22 persen angka ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang bertumbuh sebesar 2,20 persen (Lampiran 6). (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021).

Penurunan peranan sektor pertanian terhadap perekonomian daerah merupakan suatu bentuk transformasi struktural dalam perekonomian. Di mana terjadi pergeseran struktur pertumbuhan dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Namun dilihat dari struktur tenaga kerja, sektor pertanian masih menjadi sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dapat dibuktikan dari jumlah penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020, sektor pertanian menyerap tenaga kerja yang tertinggi yaitu sebanyak 93.029 dari 200.122 penduduk berusia di atas 15 tahun yang bekerja berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 atau sebanyak 46,47%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 43,67%. (Lampiran 3, 4). Tidak sebandingnya penurunan pertumbuhan sektor pertanian dengan penyerapan tenaga kerja di sektor ini hanya akan mengakibatkan sektor pertanian sebagai beban dalam pembangunan (Nurif, 2010: 124). Maka dari itu perlu ditingkatkan peranan kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian daerah.

Dalam pembangunan wilayah, patut dipertimbangkan bagaimana wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan potensi dan karakteristik spesifik yang dimiliki. Potensi tersebut jika dikembangkan dengan maksimal akan mendatangkan suatu keuntungan bagi daerah bersangkutan. Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki banyak daerah yang berpotensi untuk dikembangkan. Potensi yang dapat dikembangkan meliputi potensi kekayaan sumber daya alam dan potensi sumber daya manusia. Mulai dari potensi pertaniannya, peternakan dan perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata dan sumber daya lainnya (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2015).

Pembangunan wilayah melalui pengembangan dan peningkatan sektor basis nantinya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan daerah dan memacu peningkatan sektor lain khususnya sektor nonbasis. Hal ini dikarenakan adanya spesialisasi sesuai dengan sektor atau subsektor unggulan yang dimiliki masing-masing daerah nantinya akan dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Pembangunan wilayah pada sektor/subsektor basis diharapkan dapat memiliki pertumbuhan yang meningkat dan memiliki daya saing tinggi sehingga mampu berintegrasi ke dalam

sistem perekonomian regional maupun nasional.

Perkembangan pertumbuhan perekonomian khususnya sektor pertanian dapat dilihat perkembangannya sepanjang periode tahun tertentu. Indikator yang banyak digunakan untuk melihat perkembangan ini adalah dengan menggunakan indikator PDRB dan produksi. PDRB dan produksi sebagai indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana perkembangan pertumbuhan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota dari waktu ke waktu. Dengan menambah variabel waktu, kita dapat melihat arah perkembangan dari sektor pertanian, apakah mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahunnya.

Besarnya kontribusi yang diberikan oleh sektor pertanian tentunya berasal dari subsektor-subsektor pertanian yang ada dalam sektor pertanian daerah. Dalam penelitian ini seterusnya sektor pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota dibagi menjadi lima subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. Untuk mengetahui subsektor mana dalam sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sektor pertanian, maka perlu ditentukan subsektor pertanian mana yang menjadi basis dan nonbasis. Lebih lanjut lagi, untuk subsektor basis tersebut kemudian dapat ditelaah lebih lanjut faktor apa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari subsektor pertanian tersebut dengan menggunakan indikator produksi per subsektor dalam sektor pertanian.

Berdasarkan kondisi di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode tahun 2010-2020
2. Apa saja yang termasuk subsektor pertanian basis di Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi subsektor pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi Sektor Pertanian sebagai Basis Perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan kecenderungan pertumbuhan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode tahun 2010-2020.
2. Mengidentifikasi subsektor pertanian mana yang menjadi subsektor basis Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di subsektor pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi penulis, sebagai sarana pembelajaran dan penerapan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan serta meningkatkan kemampuan analisis terhadap suatu permasalahan atau fenomena.
2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan daerah khususnya sektor pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta sebagai referensi untuk permasalahan yang sama di masa yang akan datang.